

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data pada bulan September 2009 Provinsi Jambi memiliki luas hutan produksi yang dicadangkan seluas 38,963 ha yang tersebar di 5 (lima) kabupaten (*Direktorat BRPHP dan BPHA, 2022*). Kebijakan pembangunan HTR berupa kebijakan pemerintah daerah membentuk sesuatu yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan (*pro-poor*), menciptakan lapangan pekerjaan (*pro-job*) dan mengurangi lahan kritis di dalam kawasan hutan serta untuk memenuhi kebutuhan industri kayu sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan negara. Dalam upaya pembangunan HTR, perlu tersosialisasikan kepada masyarakat tentang pembudidayaan dan pengembangan produksi serta mekanisme tata niaga HTR perlu tertata dan terarah secara optimal, dengan kepastian produksi dan sistem pemasaran yang memberikan nilai harapan bagi masyarakat. Atas dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait yang diharapkan semua investasi yang ditanam dalam pengembangan HTR menjadi lebih baik (Ahyauddin, 2010).

Salah satu daerah yang telah memiliki izin usaha HTR berada di desa Teriti Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan HTR (IUPHHK-HTR) yang diberikan kepada Koperasi Teriti Jaya NO, SK_2887/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018 dengan luas 2.516 Ha, pada tanggal 11 Mei 2018 telah terjalin mitra antara Koperasi Teriti Jaya dengan PT. Wira Karya Sakti. Melalui skema Perhutanan Sosial, perusahaan bermitra dengan koperasi pada areal HTR ditanami tanaman akasia untuk kepentingan bisnis perusahaan yang merupakan pengembangan perusahaan ke areal masyarakat dengan menggunakan celah yang ada pada skema Perhutanan Sosial. Novayanti *et al.*, (2017) berpendapat bahwa, dalam implementasi skema HTR menjadi isu permasalahan yang tidak sederhana dan tidak mudah dalam pengelolaan hasil hutan dikawasan HTR tersebut. Pada lahan keterlanjuran tanam muncul permasalahan yang tidak sinkron antara peta milik perusahaan dengan milik pemerintah. Selain itu, pada tahun 2009 hingga tahun 2010, banyak warga yang menjual lahannya

dikarenakan banyaknya pendatang di desa Teriti dan mulai melakukan perluasan lahan perkebunan ke kawasan hutan produksi yang berada di sekitar wilayah desa Teriti. Hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik antar masyarakat dengan perusahaan. Pada dasarnya seluruh petani merasa kurang puas apabila hanya sebatas pengelola pada lahan yang mereka kelola saat ini, mereka menginginkan lahan tersebut menjadi hak milik dengan proses pelepasan kawasan, sehingga menimbulkan suatu permasalahan terhadap masyarakat yang mempengaruhi kesuksesan suatu program yang sedang dijalankan. Isu konflik lain yang terjadi di HTR yaitu warga menuding bahwa koperasi Teriti Jaya telah melakukan penyerobotan lahan perkebunan warga yang merupakan sumber penghidupan. Koperasi Teriti Jaya juga telah melakukan penggusuran lahan warga dengan mengambil kawasan tersebut masuk dalam izin usaha koperasi pada program HTR yang bermitra dengan PT. WKS. Warga meminta ganti rugi atas lahan dan tanaman yang rusak akibat penggusuran, selain itu warga menuntut adanya perombakan kepengurusan koperasi dan menambahkan warga sebagai pengurus. Dalam permasalahan tersebut perlu diperhatikan untuk mencari solusi terbaik bahwa dilihat dari fakta dilapangan yang masih minimnya peran kebijakan dan pengetahuan masyarakat akan menimbulkan efek buruk terhadap pengelolaan HTR dengan tujuan utama yaitu hutan produktif menjadi produksi berbasis wawasan lingkungan. Meninjau kembali tentang HTR ini adalah bentuk salah satu program pembangunan yang sangat strategis untuk meningkatkan produksi kayu dalam pengentasan kemiskinan masyarakat disekitar kawasan hutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Andrasmo, 2017).

Keberhasilan dalam pengelolaan HTR harus di dukung dengan keseragaman persepsi, yang berdampak terhadap perilaku masyarakat. Menurut Achmad Budiman (2012), persepsi adalah suatu tujuan untuk mencapai keberhasilan yang perlu ditingkatkan agar dapat mewujudkan semangat partisipasi dan sikap aktif dari masyarakat terhadap program pembangunan IUPHHK-HTR di Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Persepsi dikatakan baik apabila adanya kontribusi dari masyarakat sekitar dalam mewujudkan program ini. Akan tetapi sudut pandang masyarakat dalam suatu kegiatan masih dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri dipengaruhi dari persepsi seperti

umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, luas lahan HTR, jarak ke lokasi HTR dan pendapatan masyarakat sedangkan faktor eksternal persepsi dipengaruhi akan ketersediaan info dan intensitas penyuluhan (Prasojo *et al.*, 2021).

Faktor yang menjadi penentu berhasilnya suatu program HTR ini adalah dari aspek sosial seperti kemampuan, kemauan dan kesempatan masyarakat yang harus diperhatikan secara keseluruhan (Ekawati *et al.*, 2008). Dengan adanya keputusan masyarakat dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan adalah salah satu bentuk yang sangat mempengaruhi faktor subyektif seperti persepsi dari individu masyarakat dalam kegiatan program HTR (Pregernig, 2002). Pembangunan HTR di Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang akan dilakukan diharapkan dapat terlaksana. Tingkat berhasilnya suatu kegiatan dapat diukur dari persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat merupakan hal utama atas ketersediaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program yang dijalankan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Persepsi Pembangunan HTR Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan HTR di Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang akan dilakukan diharapkan dapat terlaksana. Permasalahan dalam pengelolaan kawasan hutan kurang optimal, salah satu penyebab masyarakat tidak memiliki legalitas untuk mengelola hutan, sementara sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada hasil hutan. Perhutanan Sosial ini diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan hutan secara finansial dan hutan tetap lestari. Tingkat berhasilnya suatu kegiatan dapat diukur dari persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat merupakan hal utama atas ketersediaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program yang dijalankan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu mengetahui tentang persepsi masyarakat terhadap pengelolaan HTR, persepsi masyarakat terhadap pola HTR dan persepsi terhadap manfaat HTR. Persepsi dikatakan baik apabila adanya dukungan dari masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah :

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi masyarakat HTR desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo?
2. Bagaimana persepsi pembangunan HTR desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo?
3. Bagaimana hubungan karakteristik sosial ekonomi masyarakat terhadap persepsi pembangunan HTR desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis karakteristik sosial ekonomi masyarakat HTR desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.
2. Menganalisis persepsi pembangunan HTR desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.
3. Menganalisis hubungan karakteristik sosial ekonomi masyarakat terhadap persepsi pembangunan HTR desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

1.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan penelitian. Jawaban yang diberikan ini berdasarkan pada teori yang relevan. Kebenaran dari sebuah hipotesis harus diuji secara empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data saat penelitian. Hipotesis ini juga dapat disebut sebagai jawaban teoritis (Sugiyono, 2018).

1. H_0 : Tidak terdapat hubungan antara karakteristik sosial ekonomi terhadap persepsi pembangunan HTR desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.
2. H_1 : Terdapat hubungan antara karakteristik sosial ekonomi masyarakat terhadap persepsi pembangunan HTR desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk pemegang izin HTR baik secara teknis dan lapangan untuk pengelolaan selanjutnya.
2. Sebagai evaluasi bagi para pendamping pemegang izin HTR baik dari instansi pemerintah pusat dan tingkat tapak (KPH) dan pihak mitra.
3. Bagi Koperasi Teriti Jaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa besar tingkat persepsi masyarakat terhadap pembangunan HTR.